

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hubungan diplomasi antara Tiongkok dan India dimulai sejak 31 Desember 1949. Satu dekade hingga 8 September 1959 menjadi fase buruk bagi kedua negara dalam kasus sengketa perbatasan. Wilayah sengketa perbatasan terbagi menjadi tiga sektor besar yakni Sektor Timur, Tengah dan Barat. Sektor Timur terbentang sepanjang McMahon Line termasuk Arunachal Pradesh dan Tawang. Sektor Tengah meliputi Tibet-Kashmir-Punjab hingga Uttar Pradesh. Sektor Barat meliputi Aksai Chin yang merupakan pusat sengketa di wilayah barat.

Perjanjian Panchsheel menjadi prinsip dasar dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan India. Perjanjian tersebut terdiri dari lima prinsip dasar yakni menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, tidak ada agresi militer, tidak mencampuri urusan militer, kesetaraan dan keuntungan bersama dan koeksistensi perdamaian.

Sengketa perbatasan semakin kompleks ketika Tiongkok menolak garis perbatasan McMahon Line yang dibentuk oleh Imperialis Inggris yang berujung pada perang tahun 1962. Perubahan arah penyelesaian sengketa dimulai sejak tahun 1980 yang lebih representatif bagi kedua belah pihak. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan alur politik dan prinsip dengan prinsip perdamaian dan keadilan. Pada April 2005 dibentuklah *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary* yang menjadi landasan hubungan diplomatik membahas tentang sengketa perbatasan. Perjanjian dibentuk sebagai penekanan dari perjanjian tahun 1993 dan 1996. Pada tahun 1993

menandatangani *Agreement on Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control (LAC) China-India* yang sering disebut sebagai *Confidence Building Measures (CBMs)* fundamental. Pada tahun 1996 menandatangani *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility*.

Berbagai forum telah dibentuk pasaca penandatanganan perjanjian tahun 2005 untuk memfasilitasi kedua negara membahas masalah perbatasan. Pertama, *Joint Working Group (JWG)* yang dibentuk sebagai wadah untuk membahas mengenai interaksi militer kedua negara. Forum ini berlangsung limabelas kali dan terakhir berlangsung pada tahun 2005. *Special Representative Meeting (SRM)* menjadi forum yang menggantikan JWG sekaligus pembentukan *Joint Study Group (JSG)*. Selama sembilanbelas kali pertemuan, SRM tidak memberikan hasil signifikan khususnya dalam penentuan *Line of Actual Control (LAC)*. Hal ini menjadi penting karena selama ini Tiongkok dan India belum menemukan kesepakatan bersama atas definisi LAC. Selanjutnya pada SRM kelimabelas pada tahun 2012 dibentuk forum *Working Mechanism on Consultation and Coordination (WMCC) on India-China Affairs*. Namun hingga pertemuan terakhirnya pada November 2017 belum memberikan hasil signifikan bagi permasalahan sengketa perbatasan.

Teori yang diterapkan oleh penulis yakni *Issue Linkage* dengan empat variabel pendukung *Material Linkage*, *Political Linkage*, *Trade Linkage* dan *Organisational Linkage*. Pada variabel *Material Linkage* membahas tentang implementasi CBMs dan pengaruh *state prestige* dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Kurangnya implementasi CBMs merupakan salah satu penghambat resolusi sengketa perbatasan termasuk masalah definisi LAC. Hal ini disebabkan salah satu pihak yakni Tiongkok sering melanggar perjanjian CBMs yang telah disepakati. Pada perjanjian 2005, Tiongkok melanggar beberapa pasal seperti membangun pos militer dan penerjunan pasukan di kawasan dataran tinggi Tibet. Hal ini melanggar pasal VII tentang

perlindungan dan perdamaian bagi penduduk di sekitar kawasan perbatasan. Selain itu forum yang telah dibentuk tidak berjalan efektif karena SRM yang telah berjalan selama sembilanbelas kali lebih mengarah ke ekonomi, politik dan budaya. Sementara pembahasan secara intens baru dilakukan pada forum WMCC.

Tiongkok dan India merupakan negara besar yang mempunyai daya untuk menjaga martabat bangsanya di mata internasional. *State Prestige* mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan proses negosiasi sengketa perbatasan dan sering disebut sebagai *invisible hand*. Kedua negara mempunyai kapasitas yang berimbang dalam beberapa aspek untuk melakukan persaingan. India mempunyai kewajiban untuk mempertahankan wilayah teritorialnya di sektor timur (Tawang & Arunachal Pradesh) untuk menjaga martabatnya di mata internasional. Sementara Tiongkok pun harus mempertahankan aksi klaimnya untuk menjaga trennya yang dikenal sebagai negara adidaya. Menjaga *state prestige* tidak hanya pada aspek politik namun juga kapasitas militer maupun infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan.

Pada variabel *Political Linkage* membawa dua pembahasan yakni pengaruh Tibet dan Pakistan. Kedua negara ini sama-sama mempunyai peran sentral dan bersentuhan langsung dengan kedua belah pihak di kawasan perbatasan. Tibet merupakan negara yang saat ini dibawah otonomi Tiongkok namun banyak penduduknya membangun pengasingan di India karena tidak setuju dengan status tersebut. Hal tersebut memicu perselisihan karena India membantu dan memfasilitasi orang-orang Tibet untuk membentuk pemerintahan sementara. Hal tersebut dinggap Tiongkok sebagai pelanggaran dan mengganggu urusan dalam negerinya karena Tibet merupakan bagian dari otonomi Tiongkok. Sementara Pakistan merupakan aliansi terkuat Tiongkok pasca perang tahun 1962 dengan penandatanganan *Treaty of Friendship and Cooperation and Good Neighbourly Relations*. Sementara di sisi India, Pakistan merupakan negara dengan angka konflik

terbesar di Asia Selatan khususnya dalam sengketa kawasan perbatasan *Pakistan Occupied Kashmir* (PoK). India merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok di wilayah PoK dan membangun beberapa pusat pangkalan militer, infrastruktur bahkan reactor nuklir.

Sementara pada variabel *Trade Linkage* membahas tentang pengaruh perdagangan dan ekonomi interdependensi dalam hubungan bilateral. Sejarah hubungan bilateral dalam bidang ekonomi mulai dengan penandatanganan *India-China Joint Economic Group on Economic Relations and Trade, Science and Technology* dan *Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement*. Interdependensi ekonomi menjadikan pihak investor akan lebih besar pengaruhnya dalam mempengaruhi langkah resolusi sengketa perbatasan. Selain itu akan menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam perdagangan dan menciptakan persepsi menjatuhkan yang lemah demi kepentingan nasionalnya. *Win-win solution* juga belum dicapai terlihat dari pertumbuhan defisit salah satu pihak yakni India dalam hubungan bilateral ini.

Terakhir pada variabel *Organisational Linkage* membahas tentang posisi South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) dalam sengketa perbatasan. SAARC belum menjadi organisasi regional yang stabil terbukti tigabelas dari tigapuluh satu pertemuan KTT tidak berjalan tepat waktu dan proporsional. Selain itu para anggota SAARC terbelah menjadi kubu-kubu dan lebih memilih forum multilateral di banding regional. Organisasi ini akan memberikan celah bagi internasional untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal. Seperti intervensi yang dilakukan Tiongkok dalam sengketa perbatasan India dan Pakistan. Hingga saat ini SAARC belum mempunyai peran dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India terlihat dengan absennya pembahasan sengketa dalam forum KTT.

Melihat dari hasil diatas maka dapat dilihat bahwa hambatan resolusi sengketa perbatasan tidak hanya muncul dari kurang efektifnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat namun juga

banyak faktor lainnya. Proses negosiasi ternyata dipengaruhi oleh keberlangsungan isu yang muncul di sekitar dua pihak yang bersengketa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam aspek ekonomi atau perdagangan, hubungan bilateral dengan negara tetangga (Pakistan dan Tibet) serta pembenahan organisasi regional agar proses negosiasi dapat berjalan efektif.

## **5.2 Rekomendasi dan Saran**

Penelitian selanjutnya akan lebih menarik bila difokuskan terhadap aktifitas militer dan senjata di kawasan perbatasan Tiongkok-India. Lebih spesifik di kawasan Tibet, Docklam dan Pakistan karena merupakan pusat konflik antara Tiongkok dan India hingga saat ini. Selain itu dapat dianalisis juga pengadaan nuklir sebagai salah satu senjata yang digunakan oleh kedua negara. Hal ini mengingat tes peledakan bom nuklir pada tahun 1998 yang pernah dilakukan India pada tahun 1998 dan memicu Tiongkok untuk mengembangkan pusat penelitian nuklir di sekitar kawasan perbatasan.